Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

Terbit : 26 Desember 2023

Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional

(Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang)

[1]Cut Dhea Permata Sari, [2]Hendra Ibrahim
Program Studi Manajemen, Universitas Islam Sumatera Utara
[1]cutdheapsari@gmail.com, [2]hendra@ishlahiyah.ac.id

Abstrak

Perdagangan antarnegara berperan sebagai alat untuk mengadakan pertukaran komoditas dan layanan di tingkat internasional, dan kebijakan yang mengatur perdagangan internasional disusun oleh negara-negara, baik yang telah maju maupun yang masih berkembang. Faktor politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan internasional, mencakup perlindungan industri lokal, dorongan terhadap ekspor, dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Persoalan-persoalan global juga turut berperan dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional oleh negara-negara maju, seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian lingkungan. Meski begitu, negara-negara maju dihadapkan pada tantangan dalam mengelola hubungan perdagangan internasional, termasuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik domestik, sekaligus merespons tekanan dari negara-negara berkembang. Faktor politik juga memiliki dampak terhadap arah dan kesuksesan perdagangan internasional suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang peran politik dalam konteks perdagangan internasional menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi suatu negara.

Kata kunci : Negara Maju, Negara Berkembang, WTO

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merujuk pada aktivitas perdagangan antarnegara yang terjadi melalui kesepakatan bersama. Transaksi ini melibatkan interaksi antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah atau lembaga dalam suatu negara, serta pemerintah atau lembaga suatu negara dengan pihak sejenis dari negara lain. Dalam beberapa negara, perdagangan internasional menjadi faktor kunci dalam peningkatan Gross Domestic Product (GDP), yang mencakup nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun (Andri Feriyanto, 2015). Pentingnya perdagangan internasional bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak dapat diabaikan. Meskipun kebijakan perdagangan internasional diatur oleh negara-negara, baik maju maupun berkembang, perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut tidak hanya dipengaruhi

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga oleh kekuatan faktor politik yang signifikan.

Perbedaan dalam kekuatan politik dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang seringkali menjadi penghambat bagi hubungan atau diplomasi ekonomi, seperti yang dinyatakan oleh Fahrazi (2015). Negara maju biasanya memiliki pengaruh besar dalam hal politik dan ekonomi di tingkat internasional, sedangkan negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam hal ini. Perbedaan tersebut memengaruhi pendekatan yang diambil oleh masing-masing negara terhadap kebijakan perdagangan internasional. Negara maju, umumnya, cenderung melindungi industri dalam negeri dan mendorong ekspor produk mereka, serta memiliki kemampuan untuk membentuk regulasi dan perjanjian perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, negara berkembang sering menghadapi tantangan seperti industri yang masih lemah, keterbatasan sumber daya, atau masalah lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan khusus dalam konteks kebijakan perdagangan internasional.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berfungsi sebagai lembaga internasional yang mengelola perdagangan antara negara-negara dengan mematuhi aturan dan prinsip yang adil. Peran negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat signifikan dalam struktur WTO, diberikan hak untuk mendapatkan perlakuan istimewa dan berbeda sebagai kompensasi atas keterbatasan dan kelemahan ekonomi dan perdagangan yang mereka miliki. Dalam proses perumusan regulasi perdagangan WTO, negara berkembang seringkali dihadapkan pada negara maju, dan seringkali terjadi ketidaksetaraan posisi antara keduanya, seperti yang diungkapkan oleh Mariane Delanova (2016). Keterlibatan negara-negara berkembang dalam WTO memberikan mereka peluang untuk terlibat dalam negosiasi kebijakan perdagangan internasional, serta berperan aktif dalam membentuk aturan dan kebijakan perdagangan global. Meskipun demikian, negara-negara berkembang tetap diwajibkan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO dan berpartisipasi secara konstruktif dalam proses negosiasi guna mencapai tujuan perdagangan internasional yang adil dan seimbang.

Dalam era globalisasi saat ini, peran perdagangan internasional menjadi krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dampak globalisasi di sektor ekonomi, khususnya melalui ekspansi pasar internasional, semakin membesar dan merata. Era pasar bebas membuka peluang pekerjaan yang luas, meningkatkan pendapatan negara, dan membawa dampak positif lainnya, seperti yang diungkap oleh Mastriati Hini Hermala Dewi (2019). Kebijakan perdagangan internasional yang efektif dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan investasi asing, pembukaan lapangan kerja baru, dan kenaikan produktivitas industri. Namun, perlu dicatat bahwa proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak peran politik dalam shaping kebijakan perdagangan internasional, baik di negara maju maupun negara berkembang. Politik memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kebijakan ini, serta bagaimana perbedaan politik termanifestasikan antara negara maju dan berkembang.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode kualitatif, yang diartikan sebagai metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme. Metode ini diterapkan dalam mengkaji kondisi alamiah obyek penelitian, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda (Sugiyono 2022). Fokus penelitian ini adalah deskripsi perbandingan pendekatan politik antara negara maju dan berkembang dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional, serta implikasinya terhadap proses pembentukan kebijakan tersebut. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata untuk memudahkan pemahaman.

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2022) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi, dan data statistik yang digunakan untuk mendukung analisis atau penelitian. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022), dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional Negara Maju

Salah satu aspek krusial dalam formulasi kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju adalah dampak politik domestik. Politik dalam negeri seringkali menjadi faktor utama yang mempengaruhi arah kebijakan perdagangan suatu negara. Pemimpin politik di negara maju harus mempertimbangkan kepentingan di dalam negeri mereka, termasuk aspek ekonomi dan politik, ketika membuat keputusan mengenai perdagangan internasional. Perilaku demokratis mencerminkan budaya politik nasional atau negara (Herning Suryo, 2015). Contohnya, proses pemilihan umum, tekanan dari kelompok lobi industri, dan pandangan masyarakat dapat memengaruhi kebijakan perdagangan. Dalam beberapa situasi, politik domestik bisa membatasi fleksibilitas negara maju dalam membuka pasar atau mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri. Sebaliknya, jika pemimpin politik melihat potensi keuntungan ekonomi besar dalam ekspansi perdagangan internasional, mereka mungkin mengambil pendekatan yang lebih liberal terhadap perdagangan.

Di samping faktor politik domestik, kepentingan ekonomi juga menjadi aspek utama dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Negara-negara maju umumnya memiliki perekonomian yang tangguh dan bergantung pada perdagangan internasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing internasional suatu negara bergantung pada keunggulan teknologi, produktivitas tenaga kerja, tingkat upah riil, dan tingkat keterbukaan perdagangan relatif (Natalis Christian et al., 2022). Oleh karena itu, mereka memiliki motivasi untuk memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang diadopsi mendukung kepentingan ekonomi nasional mereka. Hal ini dapat mencakup membuka pasar domestik untuk barang dan jasa asing atau mencari akses ke pasar internasional. Negara maju

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

juga seringkali berupaya untuk menjamin kondisi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan, termasuk mendorong perlindungan hak kekayaan intelektual, mengurangi hambatan perdagangan, dan memastikan akses yang setara ke pasar global. Keputusan ekonomi yang diambil oleh negara maju dalam konteks perdagangan internasional akan memiliki dampak yang signifikan pada hubungan perdagangan global serta kesejahteraan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global secara keseluruhan.

Persoalan global juga memegang peran penting dalam formulasi kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Negara-negara maju aktif terlibat dalam berbagai forum internasional dan perjanjian perdagangan regional yang berdampak pada regulasi perdagangan global. Mereka berupaya untuk memajukan nilai dan prinsip tertentu dalam konteks perdagangan internasional, seperti perdagangan bebas, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, negara-negara maju sering bertindak sebagai pihak yang memulai dalam perundingan perdagangan multilateral, termasuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dengan tujuan memengaruhi pengembangan regulasi perdagangan global sesuai dengan kepentingan mereka. Sebagai contoh, mereka mungkin mengusulkan perjanjian perdagangan yang mencakup klausul mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atau penghapusan subsidi pertanian, sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip utama dalam semua kebijakan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, adalah mencapai tujuan yang sama dalam meningkatkan penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan nasional (Resitaka Aulia Nurmamurti et al., 2022).

Negara maju sering berupaya memainkan peran sentral dalam menghadapi isu-isu global terkait perdagangan, seperti perubahan iklim dan penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk mendukung agenda-agenda ini. Sebagai contoh, mereka mungkin memberikan insentif perdagangan kepada negara-negara yang mengimplementasikan kebijakan pro lingkungan atau berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Keterkaitan antara perdagangan internasional dan isu-isu global semakin memegang peran sentral dalam penentuan kebijakan perdagangan oleh negara maju.

Walau negara maju memiliki kepentingan ekonomi besar dalam perdagangan internasional dan sering berusaha memajukan nilai-nilai dan prinsip tertentu, mereka juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam mengelola hubungan perdagangan internasional. Salah satu hambatan utama adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri. Pemimpin politik harus menghadapi dilema kompleks untuk menjaga harmoni antara dukungan proteksionisme dari industri dalam negeri dengan dorongan untuk meliberalisasi perdagangan demi kepentingan ekonomi nasional yang lebih luas.

Negara maju juga menghadapi tekanan dari negara-negara berkembang yang terus berupaya untuk mendapatkan akses lebih besar ke pasar negara maju. Negara-negara berkembang melihat negara maju sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional dan kerap menuntut perubahan dalam regulasi perdagangan yang menguntungkan mereka. Dalam merespons tuntutan ini, negara maju perlu bertindak secara bijaksana, mengambil langkah-langkah yang mendukung terciptanya perdagangan yang lebih adil sambil tetap melindungi kepentingan ekonomi nasional mereka.

Keadaan geopolitik negara maju sebenarnya memiliki tingkat sumber daya alam yang rendah dibandingkan dengan negara berkembang. Namun, melalui kemajuan yang dicapai dalam

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

teknologi dan informasi, negara-negara berkembang berhasil mencapai status sebagai negara maju (Azwar Rahmat, 2021). Tidak pastinya keadaan geopolitik juga dapat menjadi hambatan dalam proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju. Konflik politik antara negara-negara dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan pasar global. Oleh karena itu, negara maju harus menghadapi tantangan konflik geopolitik ini dan mencari solusi yang memastikan kelancaran jalannya perdagangan internasional.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, negara maju kerap berusaha aktif terlibat dalam forum internasional, seperti WTO, guna memajukan kepentingan mereka dan berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam mencari solusi untuk tantangan perdagangan global. Selain itu, mereka juga mungkin mencari kemitraan perdagangan regional sebagai strategi untuk memperkuat posisi ekonomi mereka dalam perdagangan internasional.

Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional Negara Berkembang

Peran politik negara berkembang dalam diplomasi internasional semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Beberapa faktor mendorong peningkatan signifikansi peran ini. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara-negara berkembang memberikan mereka lebih banyak kekuatan dalam perundingan internasional. Keberhasilan ekonomi ini memungkinkan mereka menjadi pemain kunci dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan pembiayaan pembangunan. Negara-negara seperti China dan India, sebagai contoh, kini menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat berpengaruh, memiliki potensi untuk mengatur peraturan-peraturan perdagangan internasional. Sementara perjanjian perdagangan bebas menawarkan janji bahwa liberalisasi pasar domestik akan membawa teknologi baru dan meningkatkan efisiensi industri, negara-negara berkembang bersedia terlibat dalam perundingan perdagangan internasional, membuka pintu bagi negara-negara industri maju untuk mengambil keuntungan dari keterbukaan pasar global (Sunu, 2020).

Jumlah penduduk yang besar di negara-negara berkembang juga menjadi faktor kunci dalam meningkatnya peran politik mereka. Populasi yang besar membawa dampak positif, seperti pangsa pasar yang luas untuk produk dan jasa, serta ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Ini menjadikan negara-negara berkembang sebagai destinasi investasi menarik dan mitra perdagangan yang signifikan bagi negara-negara maju. Selain itu, kompleksitas dan keterkaitan isu-isu global saat ini memerlukan peran politik yang kuat dari negara-negara berkembang. Bagi negara-negara Dunia Ketiga, isu-isu yang terkait dengan ancaman keamanan dalam bentuk baru (Human Security) dianggap sebagai "ancaman keamanan yang nyata" karena memiliki relevansi dengan kondisi domestik, seperti transisi politik, kelemahan penegakan hukum, ketidakpastian politik, krisis ekonomi, konflik di wilayah perbatasan, konflik etnis, dan disintegrasi bangsa. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama internasional menjadi esensial, mendorong negara-negara berkembang untuk berperan aktif dalam mencari solusi bersama dan memajukan kepentingan mereka dalam perundingan global (Amaritasari, n.d.).

Proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang melibatkan kompleksitas dan berbagai tantangan. Kebijakan perdagangan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat di negara-

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

negara tersebut. Meskipun terlihat sebagai kebijakan perdagangan, sebenarnya dibaliknya terdapat dinamika politik yang sangat kuat yang mempengaruhi setiap tahap dalam proses pembentukan kebijakan tersebut.

Kebijakan perdagangan internasional seringkali mencerminkan pandangan politik dari pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang menganut paham liberalisasi perdagangan umumnya akan menerapkan kebijakan yang mendukung akses pasar yang lebih terbuka dan mengurangi hambatan perdagangan. Dalam konteks neoliberal, liberalisasi ekonomi memungkinkan semua partisipan dalam perdagangan bebas untuk memperoleh keuntungan, asalkan mereka dapat meningkatkan daya saing mereka di panggung perdagangan global (Randy Aulia Isan, 2017). Di sisi lain, pemerintahan yang cenderung proteksionis akan lebih mungkin memberlakukan kebijakan untuk melindungi industri domestik dan memberikan keunggulan kompetitif kepada produsen lokal. Oleh karena itu, perubahan dalam pemerintahan dapat memiliki dampak besar pada kebijakan perdagangan internasional. Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional yang konsisten dan dapat diprediksi. Negara dengan stabilitas politik yang baik cenderung memiliki kebijakan perdagangan yang lebih terkoordinasi dan terarah. Sebaliknya, negara yang mengalami ketidakstabilan politik mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang konsisten, yang dapat menghambat pertumbuhan perdagangan internasional.

Pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang juga dipengaruhi oleh hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Negara berkembang yang menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain cenderung mendapatkan dukungan dan bantuan untuk mempromosikan kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Contohnya, negara berkembang yang memiliki hubungan yang solid dengan negara maju dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas dan mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas perdagangan. Sebaliknya, negara yang memiliki hubungan diplomatik yang tegang mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan dukungan dan akses pasar yang lebih terbuka.

Berbagai faktor politik turut berperan dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Ideologi politik, seperti nasionalisme ekonomi atau neoliberalisme, memiliki peran dalam membentuk pandangan dan pendekatan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh kelompok kepentingan dari berbagai sektor, termasuk bisnis, buruh, dan masyarakat sipil, juga dapat memengaruhi kebijakan perdagangan internasional melalui tekanan politik yang mereka hasilkan. Faktor-faktor politik ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang.

Selain itu, pengaruh internasional juga memiliki dampak terhadap pembentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Negara-negara berkembang sering kali mengalami tekanan dari negara-negara maju atau lembaga internasional untuk membuka pasar dan mengadopsi kebijakan perdagangan yang lebih liberal. Tekanan ini dapat mendorong negara berkembang untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan perdagangan mereka. Meskipun demikian, negara berkembang tetap dapat memanfaatkan tekanan internasional ini untuk melindungi kepentingan nasional mereka dan tetap

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

mempertahankan kebijakan yang lebih proteksionis. Meskipun demikian, menurut Sunu (2020), negara berkembang tetap bergantung pada bantuan teknis dan ekonomi dari negara maju.

Negara-negara berkembang memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam proses pembentukan kebijakan perdagangan internasional. Anggota WTO yang termasuk dalam kategori negara berkembang memiliki kursi dan hak suara di dalam forum WTO, memberikan mereka kemampuan untuk memengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Meskipun begitu, negara-negara berkembang diharapkan untuk patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO dan terlibat dalam proses negosiasi. Aam Slamet Rusydiana menekankan bahwa anggota WTO harus sepenuhnya mematuhi perjanjian-perjanjian ini, yang pada dasarnya mewajibkan mereka untuk meliberalisasi perekonomian mereka secara terencana, disiplin, terbatas, progresif, dan komprehensif. Dengan kata lain, perekonomian negara-negara berkembang diharapkan sepenuhnya menyesuaikan kegiatan ekonominya dengan mekanisme pasar bebas dan prinsip liberalisme ekonomi.

Perbedaan Pendekatan Politik antara Negara Maju dan Berkembang dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional

Perbedaan dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional menunjukkan perbedaan pendekatan antara negara maju dan negara berkembang. Pandangan yang berbeda ini tercermin dalam kebijakan yang diambil oleh negara berkembang, yang cenderung menerapkan langkah-langkah untuk menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, terutama yang berasal dari negara maju. Alasannya mencakup perlindungan lapangan kerja, dukungan bagi skala kecil dalam negeri, penguatan pelaku usaha nasional, dan perolehan devisa. Sebaliknya, negara maju mendorong keterbukaan tanpa hambatan dari negara lain, termasuk negara berkembang, mengidentifikasi kondisi ini sebagai perdagangan bebas yang mencerminkan tanpa diskriminasi terhadap asal barang atau jasa. Pentingnya pasar tergambar dalam keinginan pelaku usaha dari negara maju untuk dapat menjual produk tanpa kendala (Gaffar, n.d.).

Terdapat perbedaan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk prioritas kebijakan, strategi negosiasi, dan pandangan mengenai peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Perbedaan ini mencakup fokus prioritas dan tujuan, di mana negara maju lebih condong untuk memajukan kepentingan ekonomi dan perusahaan mereka di pasar global. Mereka sering mendukung liberalisasi perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, dan memperluas akses pasar ekspor mereka. Di sisi lain, negara berkembang memiliki prioritas yang berbeda, seperti melindungi industri dalam negeri yang masih berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin keamanan pangan serta kedaulatan ekonomi nasional. Mereka cenderung mendukung perlindungan perdagangan atau kebijakan perdagangan yang lebih berorientasi ke dalam negeri.

Dalam konteks posisi tawar menawar, negara maju umumnya memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar saat berpartisipasi dalam perundingan perdagangan internasional. Keunggulan ini memungkinkan mereka untuk aktif dalam menentukan aturan perdagangan global dan mendorong perundingan yang menguntungkan bagi kepentingan mereka. Di sisi lain, negara berkembang seringkali memiliki posisi tawar menawar yang lebih rendah dalam perundingan perdagangan internasional, dan mereka mungkin mengandalkan dukungan dan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

bantuan dari negara-negara lain.

Dari segi regulasi dan peran pemerintah, negara maju cenderung mendorong deregulasi dan keterlibatan pemerintah yang lebih terbatas dalam ekonomi. Mereka lebih suka mendukung konsep pasar bebas dan berupaya mengurangi hambatan perdagangan. Sebaliknya, negara berkembang sering memiliki tingkat keterlibatan pemerintah yang lebih besar dalam ekonomi, terutama untuk melindungi sektor-sektor strategis dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Mereka dapat menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti tarif, kuota, dan subsidi.

Negara maju sering kali terlibat dalam pembentukan atau menjadi anggota blok perdagangan regional, contohnya Uni Eropa atau USMCA (sebelumnya NAFTA), dengan tujuan memperkuat posisi mereka dalam perdagangan internasional. Seiringnya, negara berkembang juga dapat membentuk aliansi regional, seperti ASEAN atau MERCOSUR, untuk meningkatkan daya tawar dalam perundingan perdagangan dan memperluas akses pasar di tingkat regional. Meskipun demikian, ini tidak mengesampingkan kemungkinan bagi negara berkembang untuk bergabung dengan organisasi perdagangan global seperti WTO, yang memiliki keanggotaan yang mayoritas berasal dari negara berkembang. Keanggotaan negara berkembang dalam WTO bukan hanya mencerminkan partisipasi yang aktif, tetapi juga menunjukkan pemahaman bahwa perdagangan memegang peran kunci dalam upaya pembangunan mereka.

Negara-negara berkembang membentuk kelompok dengan tantangan yang beragam, dan setiap kelompok menghadapi masalah yang berbeda. Dalam konteks WTO, status negara berkembang memberikan hak-hak khusus. Beberapa perjanjian WTO menetapkan ketentuan yang memberikan masa transisi yang lebih panjang bagi negara berkembang sebelum mereka diwajibkan sepenuhnya menerapkan kesepakatan, sambil juga memberikan akses kepada mereka untuk menerima bantuan teknis. Meskipun demikian, menjadi anggota WTO yang mengklasifikasikan dirinya sebagai negara berkembang tidak otomatis memberikan keuntungan seperti yang terdapat dalam prinsip General System of Preference (GSP) dari beberapa negara maju (Nita Anggraeni, 2019).

Keanggotaan negara berkembang menjadi fokus perhatian dalam WTO, karena tujuan organisasi ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi bagi seluruh anggotanya, yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Menghadapi berbagai tantangan, negara-negara berkembang membentuk koalisi dan melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan antara sesama anggota (Nita Anggraeni, 2019). Kehadiran WTO memberikan kekuatan kepada negara-negara berkembang untuk mempertahankan hak-hak mereka yang dilanggar dan memberi kemampuan untuk memaksa negara maju untuk terlibat dalam perundingan. Adanya opsi untuk mengajukan gugatan hukum memberikan kekuatan kepada negara berkembang untuk memaksa negara maju dalam situasi tertentu.

KESIMPULAN

Peran politik dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional sangat signifikan, dipengaruhi oleh ideologi politik, kelompok kepentingan, tekanan internasional, dan tata kelola pemerintahan. Kompleksitas politik domestik dan hubungan internasional lebih memengaruhi negara maju, sementara negara berkembang menghadapi tantangan politik yang lebih besar.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Minfo Polgan
Volume 12, Nomor 2, Desember 2023
DOI : https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291
e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

Perbedaan dalam pendekatan kebijakan perdagangan terlihat, dengan negara maju mendorong liberalisasi dan ekspansi akses pasar, sedangkan negara berkembang lebih berfokus pada perlindungan industri dan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, pemahaman terhadap peran politik dalam kebijakan perdagangan menjadi sangat penting. Keputusan politik memiliki dampak besar pada arah dan kesuksesan perdagangan internasional suatu negara, sehingga mempertimbangkan faktor politik menjadi kunci dalam pengambilan keputusan perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab. (2020). EKONOMI INTERNASIONAL.

Amaritasari, I. P. (n.d.). Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional.

Andri Feriyanto. (2015). Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”. . PT.Pusaka Baru.

Anugrah Dwi. (2023, August 15). Kebijakan Perdagangan Internasional.

Azwar Rahmat. (2021). KONSEP PERBANDINGAN GEOPOLITIK, SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI NEGARA-NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG . Jurnal Edukasia Multikuktural, 3(1). Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, & Ardha Utama. (2021). Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi. Bumi Aksara.

Erna S Widodo. (2017). IDEOLOGI UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL ANTARA MERKANTILISME DAN LIBERALISM. Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha, 1(1).

Fahrazi, M. (2015). INDONESIA DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN (Perspektif Politik dan Budaya Hukum). In Jurnal Yuridis (Vol. 2, Issue 2).

Gaffar, J. M. (n.d.). Sikap Kritis Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional. http://www.negarahukum.com/hukum/sikap-negara-negara-berkembang-terhadap-
Herning Suryo. (2015). BUDAYA POLITIK NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG:SUATU PERBANDINGAN . Transformasi, 1.

Indri Riesfandiari, Ario Seno Nugroho, & Imam Tri Wahyudi. (2021). DAMPAK SAFEGUARD ATAS IMPOR BENANG TERHADAP PEREKONOMIAN: PENDEKATAN MODEL CGE . Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai , 5(2).

Laode Muhamad Fathun. (2017). PROTEKSIONISME SENGKETA DAGANG DALAM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL: PENDEKATAN NEGOSIASI STUDI KASUS: PROTEKSIONISME AS TERHADAP IMPOR DAGING KANADA . Jurnal Asia Pacific Studies , 1(1).

Mariane Delanova. (2016). Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Negara-negara Berkembang dalam G33 untuk Mempromosikan Proposal Special Products dan Special Safeguard Mechanism. Dinamika Global, 1(1).

Mastriati Hini Hermala Dewi. (2019). ANALISA DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL. Jurnal Ekonomia, 9(1).

Natalis Christian, bNatasya Des T.G, & Josephine Ardini Yaputri. (2022). KAJIAN PENGARUH SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA: NASIONAL DAN INTERNASIONAL. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 7(2).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

e-ISSN : 2797-3298
p-ISSN : 2089-9424

Nita Anggraeni. (2019). PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL . Al -Ahkam , 15(1).

Paul R. Krugman, & Maurice Obstfeld. (1991). Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan (2nd ed.). PAU-FE Universitas Indonesia dan Harper Collins.

Qomarudin. (n.d.). Kajian Tarif Impor dan Kinerja Kebijakan Harga Dasar Terhadap Daya Saing di Pasar Dunia. Jurnal Aplikasi Manajemen, 2010.

Randy Aulia Isan. (2017). KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM PEMBENTUKAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP). JOM FISIP, 4(1).

Resitaka Aulia Nurmamurti, Anisa Yuniar Faradilla, Al Imam Rismanto, Syifa Nur Afifah, Aliya Hamida, & Kenya Hilda Sar. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Trump: Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat - China . SOSPOLI, 2(1), 62–70.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sunu, A. P. (2020). Perdagangan Internasional sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power. Padjadjaran Journal of International Relations, 2(1), 3–17. https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.